

ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA BATAM

Priskila Ajoe Liasari¹, Sunarto Wage²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi,
Universitas Putera Batam ²Dosen Program
Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email: pb170810122@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Seeing the importance of the application of accounting standards for "UMKM", IAI as the body of preparation of Financial Accounting Standards (SAK) through the Financial Accounting Standards Board (DSAK) which develops accounting standards in accordance with the characteristics of "UMKM". In 2016, DSAK has endorsed SAK EMKM (Small and Medium Enterprises) and is effective as of January 1, 2018. The purpose of this research is (1) To find out the bookkeeping process carried out on a number of "UMKM" in "Batam Kota" District, (2) To find out the suitability between bookkeeping of financial statements in "UMKM" in "Batam Kota" District with SAK EMKM, (3) To know the constraints in doing the appropriate bookkeeping SAK EMKM on "UMKM" in "Batam Kota" District. In accordance with the purpose of this research, this research uses descriptive qualitative research methods. Data analysis in this study uses descriptive analysis, which is clearly described the results of research based on data obtained directly and compiled with established standards, Based on the results of research can be concluded that, (1) Bookkeeping conducted on "UMKM" is still limited to business reports that are reports that are compiled not in accordance with financial accounting standards, but entities consider it as financial statements. (2) There are still many entities that have not performed bookkeeping procedures in accounting. (3) "UMKM" have not implemented SAK-EMKM. (4) The Entity has not been able to present financial statements in accordance with SAK-EMKM.

Keywords: FAS MSMSE; UMKM

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Ismadewi et al., (2017:2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah. Perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh UMKM, karena UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun 2019 mencapai 64 juta. Dari jumlah tersebut, 99.8% merupakan UMKM yang mampu memperkerjakan tenaga kerja sebanyak

97% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Usaha kecil seperti koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yaitu 56% (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2019).

Rata-rata UMKM menggunakan dana berasal dari modal pribadi untuk menjalankan usaha tersebut, dan tidak ada pemisahan antara uang usaha dengan uang pribadi. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha untuk menjadi maju dan lebih baik membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha. Oleh sebab itu, tidak hanya dana pribadi saja yang dibutuhkan tetapi dana yang berasal dari pinjaman pihak ketiga

seperti bank, KUR atau sejenis lainnya. Namun, fenomena yang ada pada saat ini banyak UMKM yang hanya menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usaha mereka.

Standard akuntansi keuangan untuk bidang usaha yang dikategorikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas public adalah SAK-EMKM Purba, (2019:2). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang terbaru dikeluarkan oleh IAI pada 24 Oktober 2016 dan diberlakukan efektif per 1 Januari 2018. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dan pengembangan usaha Hetika & Nurul Mahmudah, (2017:2).

Di Kota Batam masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan pembukuan sesuai standar yang berlaku. Beberapa hal yang menyebabkan adalah karena adanya persepsi pelaku UMKM bahwa pembukuan tidak penting untuk usahanya, kurang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi serta tingkat pendidikan yang rendah. Pelaku UMKM tidak menerapkan pembukuannya sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, tetapi pelaku UMKM hanya melakukan pembukuan berupa kas masuk dan kas keluar dalam transaksi usahanya. Diharapkan dengan adanya pelatihan pencatatan transaksi sesuai akuntansi dan pemahaman tentang SAK EMKM, pelaku UMKM Kota Batam untuk kedepannya bisa membuat laporan dengan baik, sehingga mempermudah UMKM untuk melakukan pinjaman ke Bank untuk modal dalam mengembangkan usahanya.

Agar dapat mengajukan peminjaman ke Bank dengan mudah, maka pelaku UMKM harus membuat laporan akuntansi. Menurut Andriani et al., (2014:2), Padahal dengan adanya laporan keuangan sangat bermanfaat dalam membantu UMKM untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha kecil.

Dengan begitu peneliti akan melakukan penelitian mengenai

kepatuhan wajib pajak yang berjudul "Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam".

KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Hal ini perlu penting dalam rangka memberikan kerangka acuan untuk berbagai instansi bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan dalam hal industri UKM. Indonesia mempunyai standar akuntansi yang berlaku umum yang biasanya disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). IAI merupakan organisasi profesi yang mewadahi untuk para akuntan yang ada di Indonesia dan memiliki peran sebagai penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dengan adanya SAK EMKM maka pelaku UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK EMKM disahkan oleh anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018:3) tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk pengguna eksternal.
2. Tidak memiliki akuntabilitas public yang signifikan.

Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas public yang signifikan jika:

1. Entitas yang menguasai asset didalam kapasitas sebagai fudisia untuk sekelompok besar masyarakat.
2. Entitas yang telah mengajukan pernyataan untuk pendaftaran, atau dalam sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otorita pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan SAK EMKM, yang artinya SAK EMKM hanya diperuntukkan bagi entitas yang mempunyai laporan keuangan tidak akuntabel untuk public secara luas, yang dimana SAK EMKM diterapkan oleh usaha kecil dan menengah.

Laporan Keuangan

Menurut Firdaus & Wondabio, (2018:1) Karena tujuan dari adanya laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dapat menguntungkan sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018:7) dalam PSAK No.1 "Laporan Keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan Laporan Keuangan entitas lain." Menurut Kasmir didalam bukunya berjudul Analisa Laporan Keuangan terdapat 8 tujuan yang mana dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui kinerja atau gambaran suatu perusahaan dimana informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti manajemen perusahaan, investor, kreditor maupun

pemerintah.

Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018:8) didalam SAK EMKM meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berikut ini merupakan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Indonesia, (2008) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008:

1. Usaha Mikro
2. Usaha Kecil
3. Usaha Menengah

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, UKM merupakan usaha rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi agar dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Kementrian Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Menengah
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 – Rp. 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 – Rp. 50.000.000.000,00
2. Kriteria Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp. 300.000.000,00 –
Rp. 2.500.000.000,00

3. Kriteria Usaha Mikro
 - a. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 – lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000.

Kendala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut David, (2018:16) terdapat dua kendala yang sering muncul dalam UMKM antara lain:

1. Kendala Eksternal
 - a. Infrastruktur
 - b. Akses
 - c. Iklim usaha
2. Kendala Internal
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Akuntabilitas
 - c. Modal
 - d. Hukum

Kerangka Berpikir

Penjelasan tentang model kerangka berpikir adalah pertama dipilih UMKM apa yang ingin dijadikan untuk objek penelitian. Setelah itu ditentukan akan melakukan penelitian tentang UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dan selanjutnya penulis mencari tahu tentang pengetahuan dan pengalaman akuntansi yang diketahui oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dan selanjutnya peneliti mencari tahu apakah pelaku UMKM tersebut sudah menerapkan akuntansi dan pembukuan. Apabila pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota Kota Madya Batam, dan apakah UMKM tersebut sudah menerapkan akuntansi dan pembukuan. Apabila UMKM di Kecamatan Batam Kota Kota Madya Batam sudah membuat laporan keuangan, maka akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau belum. Setelah dievaluasi mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), selanjutnya dianalisis kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di

Kecamatan Batam Kota Kota Madya Batam.

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Rancangan yang akan digunakan untuk penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berupa studi kasus.

Populasi dan Pengambilan Sampel

Sugiono, (2014:76), "Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sesungguhnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar dapat diambil sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi".

Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu dengan cara Cluster atau quota sampling. Pengumpulan data dilakukan langsung kepada unit sampling yang akan diteliti. Didalam penelitian ini unit sampling yang akan diteliti adalah beberapa UMKM yang berada di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Berbagai jenis UMKM yang dikembangkan dengan baik di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sehingga dengan menggunakan teknik sampling cluster atau quota sampling ini diharapkan bisa menentukan sampel yang tepat dan mampu mewakili dari keseluruhan objek yang ada.

3.1 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data internal yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan tersebut yang terdiri atas data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Seperti penanggung jawab keuangan, pemilik usaha, dan bagian – bagian yang bersangkutan dengan pengolahan data keuangan usaha tersebut, sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu penerapan akuntansi.

b) Data Sekunder

Data ini didapat dari data yang sudah ada di perusahaan dalam bentuk dokumen dan informasi lain terutama pada informasi keuangan yang terjadi dalam setiap kegiatan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangannya, seperti bukti transaksi penjualan, bukti transaksi pembelian, laporan kas keluar masuk, catatan hitung, biaya overhead pabrik, rekening koran perusahaan dan piutang usaha perusahaan serta laporan lainnya yang mendukung pembuatan laporan keuangan tersebut.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Sugiono, (2014:98) mengemukakan bahwa "Interview" atau wawancara adalah usaha pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri – ciri utama interview adalah melakukan kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi dengan sumber informasi".

Tujuan dari melakukan wawancara adalah agar dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, motivasi, peristiwa, tanggapan atau persepsi, perasaan, organisasi aktivitas, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan lain sebagainya. Untuk merekonstruksi beberapa hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan memproyeksikan hal yang dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berorientasi agar mendapatkan data melalui dokumen – dokumen dan catatan yang tertulis berupa arsip terdapat didalam obyek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian berupa laporan keuangan UMKM, dan sejarah singkat mengenai UMKM yang dijadikan untuk obyek penelitian.

3.3 Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek dengan apa adanya.

Ada beberapa langkah dalam memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara ke lapangan,
2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahannya yang terjadi pada perusahaan tersebut,
3. Mengevaluasi hasil yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara serta data yang didapat,
4. Menyimpulkan kelemahan dan memberikan saran perbaikan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM.

3.4 Rencana Pengujian Keabsahan Data Uji Kredibilitas

Adapun beberapa macam pengujian kredibilitas menurut Sugiono, (2014:112) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada suatu titik tengah informasi dari data yang terkumpul agar dapat dilakukan pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada sebelumnya.

2. Perpanjangan Pengamatan

Hal ini dilakukan agar dapat menghapus jarak antara peneliti dan narasumbernya sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan lagi oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.

3. Mengadakan Membercheck

Membercheck merupakan suatu proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini bertujuan agar mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut data valid. Pelaksanaan *membercheck* dilakukan

setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah menemukan suatu temuan, atau kesimpulan.

4. Menggunakan Bahan Refrensi

Bahan refrensi merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud tersebut dapat berupa kamera, handycam, alat perekam suara dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh peneliti saat melakukan penelitian. Bahan refrensi tersebut sangat mendukung kreadibilitas data.

5. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan suatu wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan agar meningkatkan kreadibilitas dari data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang sedang diamati.

6. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti sedang mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan tersebut, berarti data tersebut sudah dapat dipercaya. Dengan demikian temuan penelitian akan lebih kredibel.

Uji Transferability

Uji transferability berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan atau digunakan dalam situasi yang lain.

Uji Denetability dan Uji Komfirmability

Uji denetability hampir sama dengan uji komfirmability, yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang akan dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian itu telah memenuhi standar komfirmabilitynya. Oleh karena itu dua pengujian ini sering kali dilakukan secara bersama – sama.

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tempat UMKM yang

berada di Kecamatan Batam Kota Kota Madya Batam.

Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Keadaan Geografis Kecamatan Batam Kota

Kecamatan Batam Kota adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Madya Batam Propinsi Kepulauan Riau. Kecamatan Batam Kota secara umum berbatasan dengan daerah – daerah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kecamatan Bengkong

Sebelah timur : Kecamatan Nongsa

Sebelah selatan:KecamatanSungai Beduk

Sebelah barat : Kecamatan Lubuk Baja

Keadaan Demografi Kecamatan Batam Kota

a. Pemerintahan

Wilayah di kecamatan Batam Kota terbagi dalam 125 Rukun Warga (RW) yang terdiri atas 451 Rukun Tetangga (RT).

b. Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Batam Kota pada awal bulan Januari pada tahun 2019 sebanyak 176.287 jiwa, yang terdiri dari 88.073 orang penduduk laki – laki dan 88.214 orang penduduk perempuan, yang terbagi atas 66.418 kepala keluarga.

c. Mata Pencaharian

Rata – rata pencaharian penduduk di Kecamatan Batam Kota bergerak di sector jasa, seperti jasa angkutan, buruh bangunan dan buruh industri, dan sebagian penduduk berprofesi sebagai PNS.

d. Pendidikan

Layaknya letak kecamatan yang cukup strategis pada umumnya, yakni di lingkungan perkotaan, penduduk Kecamatan Batam Kota mempunyai tingkat pendidikan cukup tinggi. Banyak warga Kecamatan Batam Kota yang mengenyam pendidikan, bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi disamping itu juga masih ada yang tidak

tamat SD.

Sarana

a) Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang dimaksud adalah sarana yang berwujud bangunan fisik yang mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan di Kecamatan Batam Kota sebagai contoh yaitu:

1. Gedung Kecamatan
2. Kantor Kecamatan
3. Kantor lembaga kecamatan, seperti Kantor Pemko Batam, BPS dan BPK.

b) Sarana Perekonomian

Sarana yang menunjang kegiatan perekonomian yang ada di Kecamatan Batam Kota meliputi toko, warung, bank, hotel dan pasar.

c) Sarana Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk Kecamatan Batam Kota menganut agama Islam dimana Katolik 33.442 orang, agama Budha 21.842 orang, agama Hindu sebanyak 26.887 orang dan penganut agama Konghucu sebanyak 30.825 orang. Seperti yang telah diungkapkan di atas, mayoritas penduduk Kecamatan Batam Kota beragama Islam sehingga sebagian besar sarana ibadah yang ada adalah sarana ibadah bagi mereka yang muslim. Total jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Batam Kota adalah 150 buah yang terdiri dari sarana ibadah untuk umat Islam yaitu 118 buah yang terdiri dari 85 masjid dan 33 mushola, sedangkan jumlah gereja Kristen ada 27 buah dan untuk umat Budha ada 9 buah. Kecamatan Batam Kota sendiri tidak mempunyai sarana ibadah bagi umat Hindu.

d) Sarana Pendidikan

Kecamatan Batam Kota terdapat beberapa sarana pendidikan dari taman kanak – kanak (TK) sampai dengan tingkat Akademi/Perguruan Tinggi sehingga masyarakat Kecamatan Batam Kota yang ingin mengenyam pendidikan dari TK sampai Akademi/Perguruan Tinggi tidak harus keluar dari daerah apabila mereka menginginkannya.

e) Sarana Kesehatan

Kecamatan Batam Kota mempunyai berbagai macam sarana kesehatan

sehingga warga masyarakat Kecamatan Batam Kota yang menginginkan pelayanan kesehatan tidak perlu pergi keluar daerah jika menginginkannya. Adapun sarana kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Bersalin sebanyak 3 unit, Rumah Sakit Umum sebanyak 2 unit, Puskesmas sebanyak 2 unit, Klinik Kesehatan sebanyak 24 unit dan apotek sebanyak 73 unit.

f) Sarana Perhubungan

Kelancaran arus lalu lintas harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana perhubungan yang dimaksud adalah jembatan, jalan dan sarana untuk mobilitas yang berada dan dimiliki Kecamatan Batam Kota. Di Kecamatan Batam Kota terdapat 6 km jalan kelas III, 2 km jalan kelas III A, 8,5 km jalan kelas IV, 7,5 km jalan desa aspal dan jembatan sebanyak 8 buah.

Deskripsi Permasalahan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang peneliti kaji, yaitu tentang analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), dimana standar akuntansi keuangan tersebut merupakan sebuah acuan peraturan baru dalam penyajian laporan keuangan untuk sebuah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, yakni UMKM. Maka untuk memberikan gambaran hasil penelitian mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat dilihat dari proses pencatatan maupun pembukuan akuntansi keuangan yang dilakukan pada setiap UMKM, penerapan SAK-EMKM pada UMKM, dan kendala dalam menerapkan SAK-EMKM maupun menyesuaikan pembukuan akuntansi keuangan yang dilakukan pada setiap UMKM, penerapan SAK-EMKM pada UMKM, dan kendala dalam menerapkan SAK-EMKM maupun menyesuaikan pembukuan akuntansi yang telah dilakukan dengan standar yang diatur dalam SAK-EMKM.

Dalam penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada usaha bidang kerajinan. Berikut nama UMKM yang kami teliti untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang

dilakukan:

- a. HS Rora Batik
- b. Wan Citra
- c. Penjahit Uni
- d. Batik Gonggong Real Batam

Proses Pembukuan Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Batam Kota

Proses pembukuan akuntansi pada entitas terkait adalah kunci dari kelangsungan sebuah usaha yang baik. Pada dasarnya kejelasan dalam penyampaian informasi akuntansi sebuah usaha akan mempengaruhi sikap pengambilan keputusan dalam pengembangan kemajuan usaha. Pembukuan akuntansi yang dilakukan pada UMKM di Kecamatan Batam Kota sangat beraneka ragam, namun pada dasarnya pelaku UMKM melakukan pembukuannya sebatas pemahaman mereka masing – masing dalam menjalankan usaha.

Pembukuan Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Batam Kota Dilihat dari Standar dalam SAK-EMKM

Adanya Standar Akuntansi Keuangan khusus untuk entitas sejenis UMKM, yakni SAK- EMKM menghendaki terjadinya perubahan yang mengarah pada pemahaman yang lebih mudah dalam membaca atau memahami isi dari laporan keuangan yang disajikan oleh entitas UMKM. Untuk dapat menerapkan atau sepenuhnya mematuhi SAK-EMKM, entitas harus menyajikan laporan keuangan yang di dalamnya menyatakan mematuhi semua persyaratan dalam SAK- EMKM.

Proses pembukuan akuntansi yang terjadi pada UMKM di Kecamatan Batam Kota secara garis besar belum menunjukkan adanya penerapan SAK-EMKM di dalamnya, bahkan dapat dikatakan para pengelola UMKM di Kecamatan Batam Kota belum melakukan pembukuan yang sesuai dengan kaidah dasar yang diyakini dalam ilmu akuntansi. Hal ini diperkuat dengan berbagai bukti yang ditemukan di lapangan dan pernyataan dari sejumlah informan atas pencatatan keuangan yang mereka lakukan.

Kendala dalam Melakukan

Pembukuan Akuntansi yang Benar dan Sesuai dengan SAK-EMKM pada UMKM di Kecamatan Batam Kota

Pengelolaan manajemen sebuah usaha tidak terlepas dari permasalahan yang akan menghambat tujuan dalam rangka menciptakan kemudahan pengelolaan usaha. Demikian juga dengan UMKM di Kecamatan Batam Kota dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang benar dan lengkap sesuai standar yang ditetapkan dalam SAK-EMKM. Hambatan atau kendala yang dihadapi biasanya mengenai masalah waktu, pemahaman tentang SAK- EMKM dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sistem keuangan yang baik dan benar sesuai ilmu akuntansi.

4.3 Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori Laporan Keuangan Standar SAK-EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK- EMKM) mengatur penyusunan laporan keuangan suatu entitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SAK-EMKM mencakup; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi Laporan
- c. Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas

Proses Pembukuan pada UMKM di Kecamatan Batam Kota.

Mengacu pada penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini mengarah pada upaya untuk mengetahui proses pembukuan maupun pencatatan yang terjadi pada UMKM di Kecamatan Batam Kota. Dengan demikian penulis menganalisis antara kesesuaian pembukuan atau pencatatan di UMKM dengan standar pembukuan yang baku seperti yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas sejenis UMKM, yakni SAK-EMKM.

Kendala – kendala dalam Penerapan SAK EMKM di UMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) disusun dalam rangka mengatur penyusunan laporan keuangan suatu entitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Menurut (Ni Kadek Dewi Astriani, Nyoman Trisna Herawati, 2017) faktor- faktor penyebab belum terlaksananya menerapkan aturan dalam SAK-EMKM mengakibatkan laporan yang disusun tidak mencerminkan proses akuntansi yang lazim diterapkan. Hal ini menyebabkan kurang tercapainya tujuan dari penyusunan laporan keuangan, yakni untuk menyajikan informasi mengenai transaksi dan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan yang disusun masih sebatas laporan bisnis yang dibuat sendiri sesuai pemahaman masing-masing pengelola entitas. Keterbatasan pengelola entitas dalam menerapkan atau menyusun laporan keuangan sesuai SAK-EMKM disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a) Keterbatasan sumber daya manusia dari pengelola entitas, karena pada umumnya manajemen keuangan usaha masih ditangani sendiri.
- b) Pengelola entitas belum mengetahui tentang adanya SAK-EMKM yang mengatur standar laporan keuangan untuk entitas yang mereka kelola atau usaha yang mereka jalankan.
- c) Keterbatasan waktu dalam pengelolaan keuangan usaha, karena selain harus mengelola keuangan pemilik entitas juga harus mengontrol kinerja karyawan dan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu.

SIMPULAN

Dari Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro

Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Entitas belum mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu :
 - a. Pengelola entitas belum mengetahui tentang adanya SAK-EMKM yang mengatur standar laporan keuangan untuk entitas yang mereka kelola atau usaha yang mereka jalankan.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia dari pengelola entitas, karena pada umumnya manajemen keuangan usaha masih ditangani sendiri.
 - c. Keterbatasan waktu dalam pengelolaan keuangan usaha, karena selain harus mengelola keuangan pemilik entitas juga harus mengontrol kinerja karyawan dan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu.
2. UMKM belum menerapkan SAK-EMKM karena belum menyusun laporan keuangan sesuai standar dalam SAK-EMKM yang memuat komponen- komponen laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Entitas belum melakukan prosedur pembukuan dalam akuntansi yang dikenal dengan istilah penjurnalan atau pencatatan, pengelompokan transaksi dalam buku besar, dan pengikhtisaran transaksi.
4. Pembukuan yang dilakukan pada UMKM masih sebatas laporan bisnis yang merupakan laporan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tapi entitas menganggapnya sebagai laporan keuangan. Laporan tersebut disusun berdasarkan kreatifitas sendiri dari masing-masing pengelola entitas dalam mengatur keuangan usaha yang dijalankan. Meskipun laporan yang disusun belum mengarah pada pembukuan sesuai standar akuntansi, namun pengelola/pemilik entitas selalu memperhatikan ketelitian dan

ketertiban dalam bertransaksi, yaitu dengan menggunakan nota sebagai bukti transaksi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akifa, N. (2014). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Laksana.
- Alabi Y, Awe, O. J., & Musa, L. Y. (2015). Managing Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: Challenges and Prospect. *Review of Public Administration and Management*, 3(7), 92–97. www.arabianjbm.com/RPAM_index.php
- Andriani, L., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *E-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 56–65. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2254>
- Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azizah Rachmanti, D. A., Hariyadi, M., & Andrianto, A. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.30651/blc.v16i1.2453>
- David, W. (2018). *Akuntansi UMKM*. Gava Media.
- Firdaus, R., & Wondabio, L. S. (2018). *Financial Report for Micro, Small, and Medium Enterprise According to Financial Accounting Standards: Case Study Rafita Cake*. 55(1ac 2017), 174–178. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.31>
- Hetika, & Nurul Mahmudah. (2017). Penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan sak etap pada umkm kota tegal. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 259–266.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. IAI Pusat.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-undang No. 20 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah*.
- Ismadewi, N. K., Herawati, N. T., & Atmaja, A. T. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Ternak Ayam Boiler (Study Kasus Pada Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo.
- Marisi, P. (2010). *International Financial Reporting Standards, Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty.
- Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 55. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>
- Sugiono. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta.